

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Ardiwilaga, R. Roestandi, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Teori dan Praktek, Masa Baru*, (Jakarta, 1962).
- Basuki, Sunaryo, *Diktat Hukum Agraria Jilid 1*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005).
- Dewi, Iga Gangga Santi, *Hukum Agraria*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2016).
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid I*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013).
- Hutagalung, Arie Sukanti, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, (Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Noor, Aslan, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau dari Ajaran Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2006).
- Ochtorina, Dyah dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Purbacarakan, Purnadi dan Ridwan Halim, *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan Filsafat Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

- Retnami, Setya. *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2000).
- Sabarno, Hari, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah :Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Siregar, Doli, *Management Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004).
- Soejono dan Abdurrahman, *Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik, Sewa Guna dan Hak Guna Bangunan*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1998).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 1986).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- , *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Sudaryanto, Agus, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Setara Press, 2015).
- Sudjito, *Prona Pensertifikatan Tanah secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang Bersifat Strategis*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 1987).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Sumardjono, Maria S.W., *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Kompas, 2008).
- Sutedi, Adrian, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

B. Jurnal

- Antoh, Agustina Ester, *Pengaruh Manajemen Aset Dalam Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Daerah (Studi di Kabupaten Paniai)*, Jurnal Manajemen & Bisnis Vol. 1/No. 2,

(Jayapura: Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Cenderawasih, 2017).

Kurniaji, Danar Fiscusia, *Pendaftaran Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan*, Fiat Justisia Journal of Law Vol. 10/Issue 3, (Lampung: Universitas Lampung, 2016)

Santoso, Urip, *Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Bidang Pertanahan*, Jurnal Hukum Vol. 3/No. 2, (Surabaya: Universitas Airlangga)

Ubaidillah, Amri, *Penguasaan Tanah Reklamasi Tanpa Alas Hak Atas Tanah: Studi Kasus di Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang*, Jurnal Lentera Hukum Vol. 5/ Issue 1, (Jember: Universitas Jember, 2018)

Yulistiyono, Herry, *Implementasi Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Bangkalan*, Pamator Vol. 2/No. 2, (Bangkalan: Universitas Trunojoyo, 2009).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/KMK.03/2001 tentang Tata Cara Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah

Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 030/29/112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penyelamatan Aset Daerah Tahun 2018

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang dengan nomor register perkara: 01/Pdt. G/2013/PN.Mgl.

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dengan nomor register perkara : 166/Pdt / 2014 / PT.SMG

Putusan Mahkamah Agung dengan nomor register perkara: 2694 K/Pdt/2014.